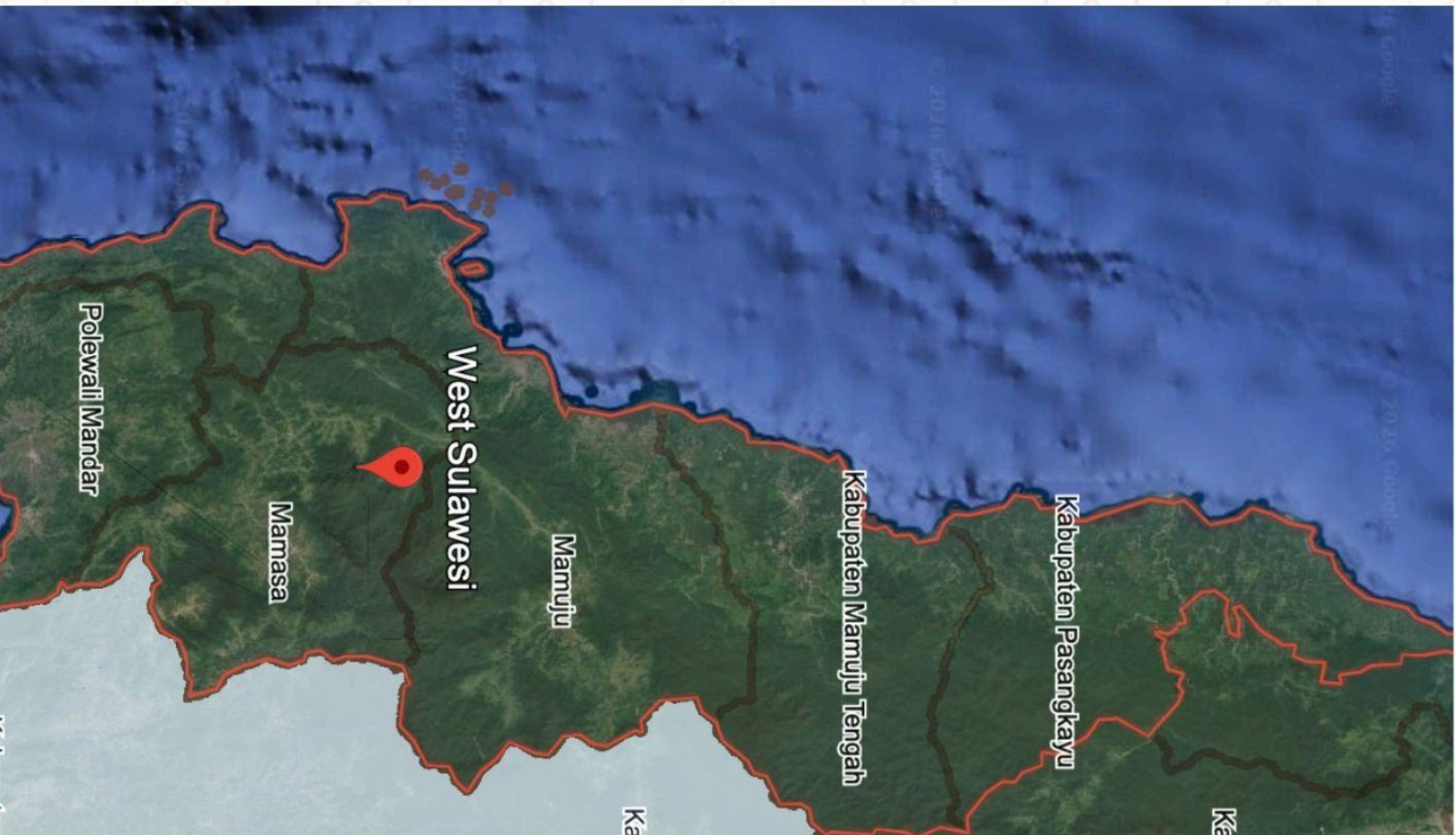


Upaya Membangun Sumber Daya Bersama Masyarakat Sipil Sulawesi Barat

*Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Provinsi Sulbar
2025*



Civic Engagement Alliance
2025



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis¹

Sulawesi Barat merupakan provinsi termuda di Pulau Sulawesi yang resmi berdiri pada tahun 2004, terdiri dari enam kabupaten dengan ibu kota di Mamuju. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Sulawesi Barat mencapai 1,45 juta jiwa pada pertengahan 2024, dengan Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah terpadat yang menyumbang 33,66% dari total populasi, disusul Kabupaten Mamuju sebesar 19,57%. Secara etnografis, komposisi penduduk provinsi ini beragam namun didominasi oleh kelompok pribumi. Merujuk data Sensus Penduduk 2010, suku Mandar menjadi kelompok etnis terbesar dengan proporsi 45,42%, diikuti suku Mamasa (10,91%) dan Mamuju (8,12%), sementara pendatang dari suku Bugis turut memberi warna demografis dengan persentase 14,49%. Di balik keragaman etnisnya, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan nyata. Pada September 2024, angka kemiskinan berada di 10,71 persen atau sekitar 155,91 ribu jiwa, meski mengalami penurunan sebesar 0,50 poin persentase dibanding Maret 2024.

Perekonomian Sulawesi Barat bertumpu kuat pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,25 persen secara kumulatif, menempatkannya pada peringkat ke delapan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB dengan pangsa 44,72 persen, diikuti industri pengolahan (11,16 persen) dan perdagangan besar dan eceran (9,94 persen). Komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekspor provinsi ini adalah kelapa sawit beserta produk turunannya. Kebijakan pembebasan bea ekspor produk CPO dan produk turunannya turut mendorong akselerasi pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan yang diperkirakan semakin menguat. Namun pada kumulatif tiga triwulan 2024, momentum pertumbuhan agak melambat; ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 4,09 persen secara kumulatif (kuartal I–III 2024) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan III-2024 berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran serta konsumsi rumah tangga.²

Sulawesi Barat menyimpan kekayaan ekologis yang signifikan, mencakup kawasan hutan tropis, pesisir, dan ekosistem laut. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sisi barat, menjadikan ekosistem pesisir dan mangrove sebagai aset lingkungan yang vital. Di Kabupaten Majene, terdapat kawasan rehabilitasi mangrove yang telah dikelola oleh komunitas lokal sejak lama. Dimana ekosistem mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi, penyedia pakan, pencegah intrusi air laut, sekaligus pendukung keanekaragaman hayati pesisir. Meskipun demikian, daya dukung ekologis wilayah ini menghadapi tekanan berat akibat konversi lahan.

¹ Sebagian informasi bersumber: BPS DIY, BAPPEDA DIY, dan KLHK (2022-2023)

Dalam pembacaan konteks Sulawesi Barat melalui pemetaan wilayah dan isu kerja organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa aktivitas sosial, ekonomi, dan gerakan masyarakat banyak terkonsentrasi di Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa. Ini dipengaruhi oleh sejarah pemekaran wilayah, konsentrasi penduduk, keberadaan pusat pendidikan dan SDM, serta kedekatan dengan Sulawesi Selatan sebagai jalur penghubung ekonomi dan pengetahuan. Isu yang dominan berkembang berkaitan dengan sumber daya alam, pesisir, pertanian/perkebunan, perempuan, dan kepemudaan. Isu ini berkait kelindan dengan ekspansi perkebunan skala besar, pertambangan, penguasaan kawasan hutan, dan berbagai persoalan ekologis seperti tsunami, gempa, sesar Poloporo, hingga kerusakan wilayah pesisir.

Masyarakat Sulbar masih memiliki modal sosial dan pengetahuan lokal yang kuat, seperti praktik pertanian, peternakan, pengelolaan pesisir, dan kearifan lokal komunitas Mandar. Namun, konteks pembangunan dan daya dukung ekologis Sulbar juga menghadapi tekanan dari investasi ekstraktif, ketimpangan akses sumber daya, konflik penguasaan lahan, perubahan pola ekonomi masyarakat, hingga lemahnya dukungan kebijakan yang adil terhadap komunitas lokal. Kondisi ini turut mempengaruhi perkembangan masyarakat sipil.

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil dan Keterlibatan Masyarakat Sipil

Pertemuan ini melibatkan berbagai jaringan masyarakat sipil di Sulawesi Barat, baik OMS/komunitas atau individu. Jaringan OMS yang terlibat ada seperti Yayasan Masyarakat Mandar Madani (YMM), Kerukunan Keluarga Pemuda Cendara, TERAS, Lentera Perempuan, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Yon Malindo, dll. Agenda yang dilaksanakan 11-12 November 2025 ini nantinya berbuah CEA Regio Sulawesi Barat.

Agenda ini dibuka dengan cerita tentang proses komunikasi yang telah dibangun bersama sekretariat CEA melalui tiga kali pertemuan secara daring. Sulawesi Barat dengan sumber daya lembaga dan komunitas masyarakat sipilnya diharapkan memiliki ruang bersama. Meskipun harapan itu diupayakan melalui agenda sederhana dan apa adanya ini, ruang bersama yang diharapkan tersebut dapat terwujud. Salah satu hal terpenting dalam gerakan adalah membangun konektivitas dan semangat bersama. Suatu saat, CEA Sulbar dapat tumbuh sebagai bagian dari cita-cita memperkuat ruang sipil di masa depan. Pertemuan inilah akan menjadi ruang belajar bersama untuk saling mengenal, berdiskusi, dan menemukan langkah-langkah ke depan bagi pengembangan CEA Sulbar.



Proses berlanjut dengan penjelasan singkat mengenai CEA, mulai dari visi, nilai, struktur, hingga cara kerja dan gerak organisasinya. Penjelasan tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam pertemuan daring sebelumnya, namun kembali dipaparkan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada peserta. Informasi lebih lengkap mengenai CEA dapat diakses melalui website CEA Indonesia yaitu <https://ceaindonesia.id/>. Dalam kesempatan ini, ditekankan pula bahwa semangat utama yang menjadi nafas pertemuan dan kerja-kerja CEA adalah gotong royong.

Melalui pemetaan wilayah dan isu kerja organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Barat, peserta merefleksikan kondisi ruang sipil dan keterlibatan masyarakat sipil yang masih terkonsentrasi di Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa. Terutama pada isu sumber daya alam, perempuan, pertanian, kepemudaan, dan pesisir. Konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah, keberadaan sumber daya dan lembaga pendidikan, serta kuatnya respons terhadap berbagai persoalan sosial dan ekologis di wilayah tersebut.



TANTANGAN:



Kebijakan (pembatasan ruang sipil)

Kebijakan yang membatasi partisipasi dan ruang gerak masyarakat sipil.



Premanisme yang dibentuk perusahaan tambang

Kelompok informal yang digunakan untuk intimidasi dan pengamanan kepentingan perusahaan.



Represi aparat dan konflik horizontal

Tekanan terhadap warga serta meningkatnya gesekan antarkelompok masyarakat.



Stigma terhadap LSM

Pelabelan negatif yang melemahkan legitimasi organisasi masyarakat sipil.



Eskalasi penggunaan alat tangkap ikan/nelayan dari luar sulbar dengan pola merusak

Penggunaan alat tangkap destruktif oleh nelayan dari luar Sulawesi Barat.



Program pemerintah, kontra produktif dengan pemberdayaan/

Intervensi yang tidak selaras dengan agenda pemberdayaan masyarakat.

Dalam refleksi bersama, ruang sipil di Sulbar dinilai menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti pembatasan gerak dan kriminalisasi oleh aparat, dominasi kepentingan investasi dan kebijakan ekstraktif, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Masyarakat sipil juga menghadapi tantangan internal berupa lemahnya konsolidasi, persoalan kepercayaan antar organisasi, ketergantungan akses pengetahuan dan pendanaan pada wilayah luar Sulbar,

serta belum terbangunnya visi bersama. Meski demikian, masyarakat sipil tetap memiliki keterlibatan dalam merespons persoalan ruang hidup, ketidakadilan gender, lingkungan, dan hak-hak komunitas, yang menjadi modal penting untuk memperkuat ruang sipil ke depan.

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Pengorganisasian basis di Sulawesi Barat masih didominasi pendekatan berbasis kasus, baik pada isu konflik sumber daya alam maupun kekerasan terhadap perempuan, yang sekaligus menjadi ruang membangun kesadaran kritis dan solidaritas masyarakat. Selain itu, pengorganisasian menghadapi tantangan berupa stigma terhadap OMS, lemahnya perlindungan dan kesadaran kolektif terkait keamanan pendampingan, krisis kepercayaan antar komunitas akibat pengalaman jejaring berbasis sumber daya, serta sulitnya regenerasi kader lokal. Di sisi lain, terdapat upaya menjaga keberlanjutan melalui pendekatan budaya dan seni meskipun orientasi pengorganisasian dinilai belum mengarah pada strategi jangka panjang. Sehingga, jaringan OMS di sana memerlukan penguatan dan memunculkan kader-kader lokal, pendekatan pengorganisasian berbasis kewilayahan, serta pembangunan konektivitas antar kerja pengorganisasian untuk memperkuat ketahanan, keberlanjutan, dan perlindungan gerakan masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

1. Memberikan perhatian pengorganisasian untuk memunculkan kader-kader local
2. Meletakkan pendekatan pengorganisasian berbasis kasus dalam kerangka kewilayahan, khususnya dalam kaitan dengan potensi sumberdaya.
3. Membangun konektivitas kerja-kerja pengorganisasian untuk ketahanan, keberlanjutan dan perlindungan

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan utama pada pengelolaan pengetahuan, penguatan advokasi, dan perlindungan kolektif. Meskipun budaya berbagi pengalaman dan pengetahuan sudah berlangsung di berbagai organisasi, belum terdapat sistem bersama yang mampu menghubungkan, mendokumentasikan, dan mendistribusikan pengetahuan antar organisasi secara terstruktur. Dalam kerja advokasi, OMS memiliki kekuatan pada pendekatan berbasis data dan kemampuan membangun jaringan lintas isu, terutama pada isu pendidikan, lingkungan, perempuan, dan pertambangan. Namun, praktik tersebut masih bersifat kasuistik. Di sisi lain, aspek perlindungan dan safeguarding masih sangat lemah karena belum ada kebijakan, mekanisme, maupun kapasitas kolektif yang terbangun. Dengan situasi tersebut

dan membaca kebutuhan ke depan, OMS Sulbar memilih membangun aksi advokasi kolektif yang dapat dijadikan ruang pembelajaran. Ruang ini nantinya guna membuat sistem pengelolaan data dan pengetahuan serta berbagi kapasitas dan sistem perlindungan kolektif.

Rekomendasi Prioritas

Membangun aksi advokasi kolektif yang dapat dijadikan ruang pembelajaran untuk membuat sistem pengelolaan data dan pengetahuan dan sharing kapasitas dan sistem perlindungan secara bersamaan.

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Konektivitas masyarakat sipil di Sulawesi Barat masih berjalan secara sporadis dan sangat bergantung pada relasi individu maupun masing-masing organisasi. Dalam menjawab tantangan lintas generasi, sebenarnya beberapa organisasi telah memiliki model pengelolaan transfer pengetahuan. Hanya saja, proses tersebut masih berlangsung secara informal dan belum terlembagakan. Di sisi lain, komunikasi lintas organisasi, lintas isu, lintas wilayah, maupun dengan jaringan nasional belum memiliki mekanisme bersama yang terbangun secara kolektif, sehingga koordinasi cenderung mengikuti afiliasi dan kepentingan organisasi masing-masing. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya sistem database bersama untuk memetakan profil, kapasitas, dan kepakaran OMS di Sulbar, serta minimnya ruang refleksi bersama antar aktor masyarakat sipil. Maka dari itu, OMS di Sulbar perlu memetakan kembali aktor-aktor gerakan masyarakat sipil. OMS Sulbar juga perlu membuka ruang komunikasi bersama guna membangun konektivitas untuk saling mengenal dan menemukan spirit bersama.

Rekomendasi Prioritas

1. Memetakan kembali aktor-aktor gerakan Masyarakat sipil di Sulawesi Barat.
2. Membuka komunikasi dengan aktor-aktor Masyarakat sipil untuk mulai membangun konektivitas untuk saling kenal, terhubung dan menemukan spirit bersama.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Mobilisasi sumber daya masyarakat sipil di Sulawesi Barat menunjukkan adanya potensi dan pengalaman yang cukup beragam, baik melalui negosiasi dengan pemerintah daerah, akses pendanaan berbasis jaringan, maupun pengembangan model swadaya komunitas. Misalnya, kontribusi anggota, dukungan alumni, usaha komunitas, pengelolaan warung

organisasi, hingga pengembangan produk lokal oleh kelompok perempuan. Beberapa organisasi juga mulai membangun praktik pendanaan kolaboratif, seperti untuk merespons kebencanaan dan penyelenggaraan kegiatan budaya, contohnya Festival Teluk Mandar. Namun, sebagian besar model usaha dan pendanaan komunitas masih bersifat jangka pendek dan belum mampu menopang ketahanan finansial organisasi secara berkelanjutan. Meski demikian, basis komunitas dinilai memiliki potensi sumber daya yang kuat untuk dikembangkan, sehingga diperlukan ruang bersama. Bentuknya ruang bersamanya adalah festival pangan lokal tahunan yang tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga ruang konsolidasi, narasi, seni, dan budaya masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

Festival pangan lokal tahunan yang dapat menjadi ruang ekonomi, ruang berkumpul, ruang narasi, seni dan budaya.

Dimensi Regulasi Pendukung

Masyarakat sipil di Sulawesi Barat memaparkan sejumlah kebijakan yang mendukung. Di Mejene, terdapat kebijakan menurunkan hutan lindung menjadi hutan rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat dan aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani. Tantangannya, sebagian besar kebijakan tersebut belum didukung aturan teknis, komitmen anggaran, maupun pemanfaatan yang optimal untuk kepentingan advokasi. Situasi tersebut juga dihadapkan dengan berbagai kebijakan tata ruang, perizinan sumber daya alam, proyek strategis nasional, hingga pelibatan aparat keamanan dalam urusan ruang hidup. Implikasinya terhadap pembatasan ruang gerak masyarakat sipil dan akses masyarakat terhadap wilayah kelola mereka.

Upaya advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan pembangunan sebenarnya cukup aktif, terutama oleh kelompok perempuan melalui forum musrenbang. Sayangnya, upaya ini masih bersifat sporadis, belum terkoneksi lintas isu dan lemah dalam mengawal proses hingga tingkat kabupaten. Selain itu, pelibatan kelompok perempuan dan disabilitas dalam penyusunan kebijakan sering kali masih bersifat formalitas. Akses terhadap kebijakan anggaran pun cenderung tertutup. Untuk merespon itu, OMS perlu agenda advokasi kolektif yang dapat menjadi ruang kolaborasi dan laboratorium bersama untuk memperkuat advokasi masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

Perlu ada agenda advokasi kolektif (kolaborasi) yang bisa jadi laboratorium.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

OMS di Sulbar mengembangkan berbagai narasi advokasi alternatif berbasis budaya, pengalaman masyarakat, dan ruang hidup lokal. Bentuknya beragam, diantaranya festival sungai, festival teluk, dan festival pangan lokal yang mengangkat nilai budaya serta pengelolaan wilayah berbasis komunitas. Praktik-praktik budaya seperti Mapandesasi juga digunakan sebagai medium untuk menarasikan kembali pentingnya pengelolaan ruang hidup yang berakar pada tradisi lokal. Namun, narasi budaya dan seni tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan agenda advokasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Konsolidasi gerakan masyarakat sipil umumnya masih terjadi pada agenda-agenda berbasis event dan terbatas pada kelompok dengan kepentingan isu yang sama, sehingga belum berkembang menjadi konsolidasi advokasi kolektif lintas isu. Kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan transpuan mulai hadir di ruang publik, tetapi keterlibatan mereka belum terintegrasi secara kuat dalam agenda advokasi bersama. Kebutuhan pentingnya adalah membangun konektivitas antar OMS atau komunitas dan memperbesar narasi advokasi bersama agar dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.

Rekomendasi Prioritas

Menciptakan ruang konektivitas dan memperbesar narasi advokasi untuk kepentingan yang lebih luas.

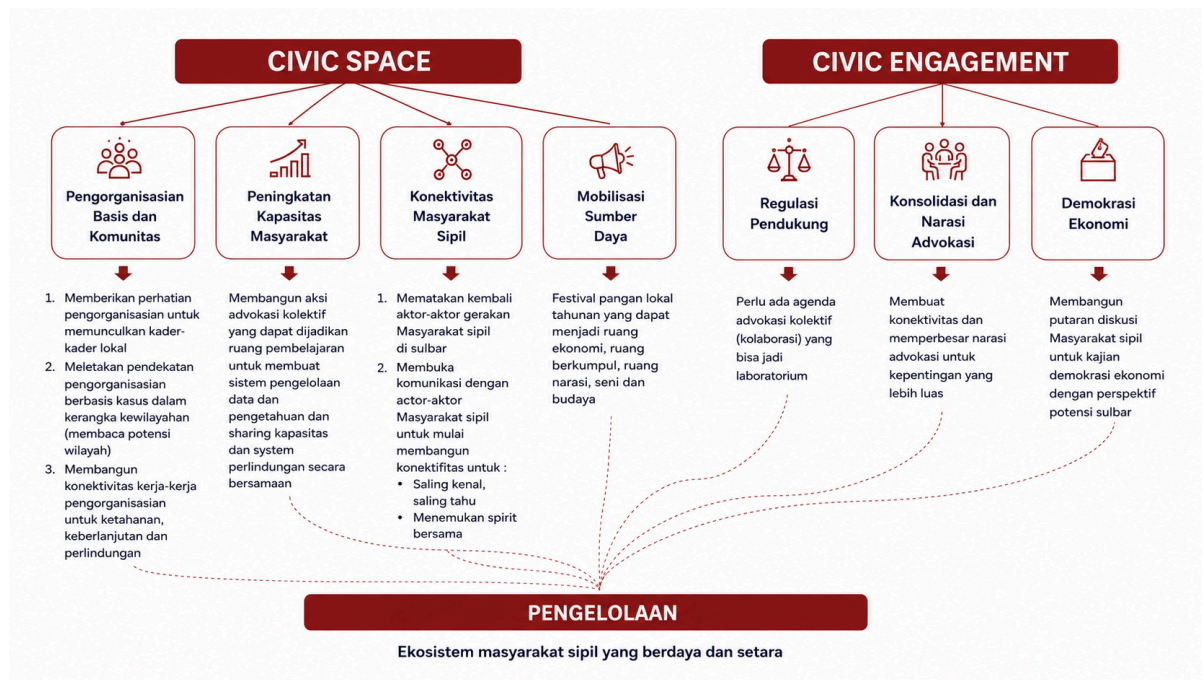
Dimensi Demokrasi Ekonomi

Praktik ekonomi berbasis komunitas di Sulbar, diantaranya pengelolaan pertanian kolektif, arisan kelompok tani dan nelayan, pengelolaan hasil kebun, serta usaha pengolahan limbah yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan kelompok dan anggota. Sejumlah praktik tersebut dibangun melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama. Antar komunitas mulai terhubung untuk membuka akses jejaring pemasaran sesamanya. Praktik demokrasi ekonomi ini masih bersifat terbatas dan belum mampu menjadi basis kemandirian ekonomi komunitas maupun organisasi secara berkelanjutan. Selain itu, dimensi ini belum menjadi fokus perhatian masyarakat sipil di Sulbar. Oleh sebab itu, OMS Sulbar merasa perlu ruang diskusi dan kajian masyarakat sipil untuk memperkuat perspektif demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan potensi Sulbar.

Rekomendasi Prioritas

Membangun ruang diskusi masyarakat sipil untuk kajian demokrasi ekonomi dengan perspektif potensi SDA Sulawesi Barat.

Diagram situasi ruang sipil dan pelibatan sipil regio Sulbar adalah sebagai berikut:



Kesimpulan

Refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan sipil di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih bertahan dan terus bergerak melalui kerja-kerja berbasis komunitas, budaya, dan respons atas berbagai krisis ruang hidup, terutama terkait konflik sumber daya alam, pesisir, perempuan, pertanian, dan kepemudaan. Namun, kekuatan tersebut masih berjalan secara sporadis, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada inisiatif individu maupun organisasi masing-masing. Tantangan utama yang dihadapi meliputi lemahnya konektivitas antar-OMS, belum adanya sistem perlindungan kolektif, keterbatasan pengelolaan pengetahuan bersama, rendahnya keberlanjutan pendanaan, hingga tekanan eksternal berupa represi aparat, kepentingan modal, stigma terhadap LSM, dan kebijakan pembangunan yang membatasi ruang hidup masyarakat. Di sisi lain, Sulbar memiliki modal sosial dan budaya yang kuat untuk menjadi basis konsolidasi gerakan, terlihat dari praktik-praktik advokasi berbasis festival budaya, solidaritas komunitas, ekonomi kolektif, hingga keterlibatan kelompok perempuan dan masyarakat pesisir dalam ruang publik. Karena itu, kebutuhan paling mendesak yang muncul dari konsolidasi ini adalah membangun konektivitas gerakan yang lebih terorganisir, memperkuat kaderisasi dan perlindungan komunitas, mengembangkan sistem pengetahuan dan advokasi kolektif, serta memperbesar narasi perjuangan berbasis budaya dan potensi lokal agar masyarakat sipil Sulbar mampu berkembang sebagai ekosistem yang lebih berdaya, setara, dan berkelanjutan.